

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI-SELATAN**

SKRIPSI

NURUL FAHMI

10573 04797 14



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI-SELATAN**

OLEH

NURUL FAHMI

NIM 10573 04797 14

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada kedua orang tuaku, keluarga yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku serta sahabat tercinta.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apa apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” (Q.S AL- Insyirah 6-7).



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

Nama Mahasiswa : Nurul Fahmi
No. Stambuk/ NIM : 105730479714
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Amril, SE., M.Si. AK., CA
NIDN : 0020087606

Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN : 0905107302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.,CA.,CSP
NBM : 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama NURUL FAHMI, NIM 105730479714, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA 
2. Faidul Adzim, SE., M.Si 
3. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC 
4. Drs. H. Hamzah Limpo, M.Si 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "*Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan*."

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak ibu yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak, selaku Pembimbing I Amril, SE., M.Si. AK., CA yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak, selaku pembimbing II Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Pembimbing II yang telah berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas Ak.5-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih kepada sepupu Asdar SE. MSi yang selalu memberikan doa dan support hingga saya dapat menyelesaikan studi dengan lancar.

10. Terimah kasih kepada Ikbal S, SE yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan lancar.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya Tulis satu persatu yang telah memberikan semangat. Kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada samua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantias mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum WR, WR.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

NURUL FAHMI, Tahun 2018 Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Amril dan Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data diolah menggunakan program windows spss 23.0. Teknik analisis data yakni analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu $2,371 > 2,048$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,025$ ($0,025 < 0,05$). Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Kata Kunci : *Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan*

ABSTRACT

NURUL FAHMI, in 2018 the influence of effectiveness of accounting standard implementation of government financial statements at Regional income board of South Sulawesi Province, thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar guided by Amril, and Ismail Rasulong.

This study aims to determine the effect of effectiveness of the application of government accounting standards to the quality of local government financial statements at the regional income agency of south sulawesi province. The type of research used in this study is quantitative research. Data processed using window spss 32.0 program.

Technique of data analysis that is simple regression analysis. The result of the research shows that the effectiveness of the application of government accounting standard has a positive and significant influence to the quality of financial statements at the regional income agency of south sulawesi province It is show that the value of t-count is greater that t-table that is $2.371 > 2.048$ with a significant level of $0,025$ ($0,025 < 0.05$).

Keywords: effectiveness of application of government accounting standars, Quality of financial statements.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	
1. Teori <i>Entity</i>	7
2. Teori Kegunaan-Keputusan	8

3. Standar Akuntansi Pemerintahan	9
4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	11
5. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan....	14
6. Kualitas Laporan Keuangan	14
7. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	19
B. Tinjauan Empiris	20
C. Kerangka Konsep	23
D. Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	26
D. Populasi dan Sampel Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	35
B. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	37
C. Visi Misi	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Data	51
B. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas	60

C. Hasil Pengujian Hipotesis	62
D. Pembahasan dan Hasil Penelitian	65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	27
Tabel 3.2	Pemberian Skor Jawaban	30
Tabel 3.3	Kriteria Rentang Pengklasifikasian	31
Tabel 4.1	Jenis Kelamin Responden	52
Tabel 4.2	Pendidikan Terakhir Responden.....	52
Tabel 4.3	Usia Responden	53
Tabel 4.4	Lama Bekerja Responden	54
Tabel 4.5	Deskripsi Jawaban Variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X).....	55
Tabel 4.6	Klasifikasi Skor Jawaban Responden Mengenal Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	57
Tabel 4.7	Deskripsi Jawaban Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	58
Tabel 4.8	Klasifikasi Skor Jawaban Responden Mengenal Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y).....	59
Tabel 4.9	Uji Validitas.....	61
Tabel 4.10	Uji Reabilitas.....	61
Tabel 4.11	Koefisien Determinasi (R ²).....	62
Tabel 4.12	Uji-T.....	64

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	23
Gambar 4.1	Bagan Struktur Unit Pelayanan.....	38
Gambar 4.2	Bagan Pendapatan Daerah	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, social dan kondisi perkonomian yang berbeda antara masing-masing daerah sehingga mmebutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Selain itu era globalisasi yang menuntut daya saing disetiap Negara juga menuntut daya saing pada setiap pemerintah daerahnya. Daya saing pada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat tercapai melalui otonomi daerah eengan peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih sehingga dengan adanya otonomi daerah peneglolaan keuangan berada pada pemerintah daerah. Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut menyangkut reformasi sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.

Pemerintahan Indonesia telah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi sektor publik yang memuat rumusan secara terperinci mengenai elemen-elemen standar akuntansi. Pernyataan tersebut dinamakan pernyataan standar akuntansi sektor publik, yang dalam pemerintahan disebut pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP).

Bagi para pengawas keuangan daerah, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek

pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan standar akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengambil keputusan.

Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, dan kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sampai basis akrual.

Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah semakin maju dan profesional karena telah direvisi beberapa kali sesuai dengan perkembangan akuntansi, baik di Indonesia maupun dunia. Mengkaji SAP tidak akan lepas dari perbandingannya dengan SAK. Kelemahan-kelemahan yang kini masih terdapat pada SAP tersebut selayaknya bisa diperbaiki dengan membandingkannya dengan SAK.

Namun, karena pemakainya berbeda, perbandingan yang dilakukan juga tidak bisa kaku. Perbandingan itu baiknya lebih dititikberatkan pada sejauh mana keduanya mampu menjadi pedoman bagi masing-masing penggunanya.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah harus melibatkan kajian kelembagaan yang tentunya telah disesuaikan dengan besar tugas dan kewenangan yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mewujudkan implementasi good governance pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk mengantisipasi dan membenahi diri dalam penataan kelembagaan dilakukan suatu kajian akademis sebagai amanat Undang-Undang.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan daerah untuk pencapaian target-target makro pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya penajaman penanganan pada institusi pendapatan yang menyangkut peningkatan pelayanan, kualifikasi SDM, standarisasi sarana kerja, penguatan tata laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam mengoptimalkan kinerjanya.

Berbicara mengenai Standar Akuntansi Pemerintah tentu sangat erat kaitannya dengan kualitas laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Untuk itu sangat tidak heran ketika banyak sekali peneliti tertarik untuk mengalisis lebih jauh mengenai persoalan tersebut. Dua diantara banyak peneliti yang pernah membahas lebih jauh mengenai persoalan ini adalah: 1) Penelitian yang dilakukan oleh Eka Danofi R (2013), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu adalah menggunakan pengukuran efektivitas dan objek penelitian yang lebih luas. Dari penelitian tersebut memaparkan bahwa adanya pemahaman yang baik atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula.

2) Nurlaila (2014), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar menunjukkan hasil bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari dua diantara sekian banyaknya penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai keterkaitan antara Standar Akuntansi Pemerintah dengan kualitas laporan keuangan, maka penulis pun juga sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan persoalan yang sama tetapi lokasi yang berbeda. Adapun judul penelitian yang penulis ajukan adalah "*Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Apakah efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan" ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menambah informasi terkait dengan pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.
- b. Menambah ilmu pengetahuan, dengan adanya teori-teori yang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi penulis selanjutnya.
- c. Bagi kaum akademisi, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pemikiran yang dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan Ilmu Akuntansi dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis pengaruh Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah daerah

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

- b. Bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.
- c. Bagi divisi terkait, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang pengaruh Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori *Entity*

Organisasi merupakan sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan manajemen yang baik yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. Dalam rangka menjalankan proses manajerial tersebut, diperlukan informasi yang baik pula, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Informasi yang dimaksud ada yang bersifat kualitatif dan adapula kuantitatif. Informasi kuantitatif tersebut ada yang dikatakan informasi akuntansi dan nonakuntansi. Informasi akuntansi ini mendeskripsikan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas keuangan dengan disertainya satuan moneter.

Teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Swardjono dalam Santoso, 2008) bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan modal ke dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif tersebut, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan

usaha menjadi kesatuan pelapor (*reporting entity*) yang bertanggung jawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggung jawaban, sementara laporan keuangan merupakan medium pertanggung jawaban.

Mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori entitas tersebut telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang berbunyi.

Tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam penyajian informasi akuntansi pemerintah sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Teori Kegunaan-Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Menurut Sofyan (2011:153) proses penetapan dan pelaksanaan standar merupakan hal terpenting bagi profesi akuntansi. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Adapun kaidah-kaidah yang harus terpenuhi sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dimuat dalam kerangka konseptual agar memenuhi tujuannya, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.

3. Standar Akuntansi Pemerintah

1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Mahmudi (2011:271), standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi

keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (mahmudi, 2011:271).

SAP tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah pusat/ daerah , jika menurut peraturan perundang -undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah . PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis akrual dimaksud tercantum dalam lampiran I PP No. 71 Tahun 2010.

Manfaat standar akuntansi pemerintah Menurut mahmudi (2011:271), sebagai berikut:

- a. Standar akuntansi yang digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
- b. Standar akuntansi yang digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
- c. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
- d. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.
- e. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, definisi standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi yang pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka

laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

Akuntansi pemerintahan menurut Rachmat (2010:19) merupakan sistem pelaporan, perhitungan, pengelompokan, informasi, dan ringkasan yang bersifat kuantitatif mengenai keuangan yang berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang berhubungan dengan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan yang disajikan pelaporan keuangan pemerintah (Deddi Nordiawan 2012:132).

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

b. Prinsip nilai historis

Aset dicat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Prinsip nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. sul-sel.

c. Prinsip realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari priode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini bukan berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi-informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan

tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan (Nordiawan, 2012:132).

5. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Robert & Vijay (2005:174) dalam Nurlaila (2014:31) menyatakan bahwa efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Suatu system dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

6. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut permadi (2013:49) menyatakan laporan keuangan adalah suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang diberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode. Laporan keuangan pada dasarnya harus memiliki kualitas informasi atau karakteristik kualitatif agar dapat memberikan informasi yang berkualitas tinggi bagi para pemakainya seperti:

- a. Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai .(IAI, dikutip dalam harahap, 2012: 130).
- b. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. .(IAI, dikutip dalam harahap, 2012: 130).
- c. Keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal .informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. (IAI, dikutip dalam harahap, 2012: 130).
- d. Dapat dibandingkan. Implikasi penting dari katrakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. (IAI, dikutip dalam harahap, 2012: 130).

Laporan Keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Definisi kualitas menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu tingkat baik buruknya sesuatu; derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb); mutu. Berdasarkan pengertian tersebut, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap hasil atas suatu kerja nyata yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

1. Kendala dalam Menghasilkan Laporan Keuangan yang Berkualitas
Menurut Mardiasmo (2009:144) Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (*reliable*). Namun demikian, beberapa kendala yang sering dihadapi oleh akuntansi sektor publik untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan, diantaranya yaitu:
 - a) Objektivitas yaitu adanya benturan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan *stakeholder*.
 - b) Konsistensi yaitu agar tidak terjadinya keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya.
 - c) Daya banding, yaitu semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda
 - d) Tepat waktu terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan.
 - e) Ekonomis dalam penyajian laporan terkait dengan biaya untuk penyajian laporan keuangan.
 - f) Materialitas yaitu apabila mempengaruhi keputusan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan investasi dari kredit (hery, 2013: 26). SFAC No.1 Menjelaskan tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi pelaporan untuk organisasi pencari laba (profit organization) adalah:

- a) Memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan secara rasional mengenai investasi, kredit, dan lainnya.
- b) Memberikan informasi bagi membantu investor atau calon investor, dan kreditur serta pemakai lainnya dalam menentukan jumlah, waktu, dan prospek penerimaan kas dari deviden atau Bunga dan juga penerimaan dari penjualan, piutang, atau saham, dan pinjaman yang jatuh tempo.
- c) Memberikan informasi tentang sumber daya (aktiva) perusahaan, atas aktiva dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lain terhadap aktiva dan kewajiban.
- d) Memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama satu periode.
- e) Memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan dan pengembalian, tentang transaksi yang mempengaruhi modal, termasuk deviden.
- f) Pembayaran lainnya kepada pemilik, dan tentang faktor –faktor yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

- g) Memberikan informasi tentang bagaimana tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada pemilik atas pengguna sumber daya (aktiva) yang telah di percayakan kepadanya.
- h) Memberikan informasi yang berguna bagi manajemer dan direksi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pemilik perusahaan (Hery,2013:2)

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat tujuh laporan keuangan pokok, yaitu:

Laporan realisasi anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber, lokasi dan pemakain sumber daya keuangan yang kelola oleh pemerintah pusat/daerah , yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam dalam satu periode pelaporan.Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan- LRA, belanja, transfer,dan pembiayaan.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan peubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurun saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca, merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk suatu entitas pada saat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana tanggal tertentu.

Laporan operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggara pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa .

Laporan arus kas (LAK), menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi investasi pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

Laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam sap serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

7. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian SAP merupakan

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain itu dari hasil penelitian Eka Danofi (2013:80) mengemukakan bahwa adanya pengaruh atas Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik pemahaman serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan pusat dan daerah, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

B. Tinjauan Empiris

Sebelumnya ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, memiliki banyak versi indeks untuk mengukur kualitas laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel. Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, antara lain sebagai berikut :

Dhedy Triwardana. Dengan judul penelitian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Hasil penelitian hasil uji validitas data yang digunakan untuk

mengukur sah atau tidak suatu kuesioner, hasil uji reabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pernyataan, hasil uji normalitas grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas, hasil uji multikolinieritas nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas, hasil uji heterokedastisitas terlihat bahwa titik-titik membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. (Dhedy Triwardana, 2017).

I Wayan Karsama, I Gusti Ngurah Agung Suaryana. Dengan judul penelitian pengaruh efektivitas penerapan SAP, kompetensi SDM dan pada kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten bangli. Dengan hasil penelitian berdasarkan hasil uji T yang dilakukan, diketahui bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki regresi 0.175 dengan T hitung sebesar 2.991 dan nilai signifikan sebesar 0.005 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. (I Wayan Karsama dkk, 2017).

Pravitasari Eka Ningtyas, Dini Widyanti. Dengan judul penelitian pengaruh eketivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terkait pengaruh efektivitas penerapan standar pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa terhitung 2,367 dengan nilai signifikan sebesar $0,024 < 0.05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,622 menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Pravitasari Eka Ningtyas, Dini Widyanti, 2015).

Friska Langelo, David Paul Ella Saerang, Stanly Winyson Alexander. Dengan judul penelitian analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota blitung. Dengan hasil penelitian penggunaan basis akrual akuntansi di pemkot blitung juga masih menggunakan CTA, CTA sendiri disebut juga dengan basis modifikasi. Pemerintah kota blitung menyajikan 4 (empat) laporan keuangan yaitu: neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK). (Friska Langelo, 2015).

Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas. Dengan judul penelitian penerapan standar akuntansi pemerintah pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD) kabupaten toraja utara. Dengan hasil penelitian data yang diperoleh antara lain: jurnal umum 2013, laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2013, Neraca tahun 2013, laporan arus kas (LAK) tahun 2013 dan catatan atas laporan keuangan (CALK) tahun 2013. Dasar penyusunan laporan keuangan daerah tersebut berpedoman pada peraturan pemerintah no. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan SAP (Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas 2014.)

Nurlaila dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi Pemerintahan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Nurlaila 2014).

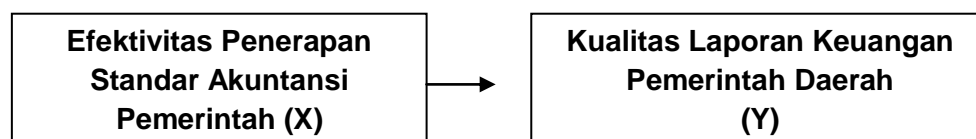
C. Kerangka Konsep

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan, diperlukan suatu standar akuntansi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah.

Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitasnya penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus memenuhi karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep

Sumber: Data Diolah, 2018

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Maka hipotesis yang pada penelitian ini adalah bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. (Kasiram, 2008:149).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat objek yang akan diteliti. Sehingga merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam penelitian demi mendapatkan data-data yang akurat dan relevan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama kurang lebih dua bulan (Mei-juni 2018) dengan mengedarkan kuesioner pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono dalam Husein Umar (2014:47) menyatakan bahwa variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Variabel independen (bebas) yaitu Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dengan variabel X. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam kerangka konseptual disebutkan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Responden diminta untuk memilih satu dari lima skala pada setiap pertanyaan sesuai yang dipraktikkan oleh Instansinya. Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan efektif (ditunjukkan dengan skala seluruhnya diterapkan) atau rendah (ditunjukkan dengan skala tidak diterapkan).
- b. Variabel dependen (terikat) yaitu kualitas laporan keuangan yang dinyatakan dengan variabel Y. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang berkualitas dapat diukur melalui empat dimensi yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat dimensi tersebut mengandung beberapa indikator. Responden diminta untuk memilih satu dari lima skala pada setiap pertanyaan sesuai fakta yang mereka lihat selama ini dalam lingkungan pemerintahan. Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah Laporan keuangan berkualitas (ditunjukkan dengan skala seluruhnya diterapkan) atau tidak berkualitas (ditunjukkan dengan skala tidak diterapkan).

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Aspek	Indikator	Skala
Variabel X: Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Basis Akuntansi	1. Basis akrual 2. Basis kas	Ordinal
	Nilai Historis	1. Penilaian aset 2. Penilaian kewajiban	Ordinal
	Substansi mengungguli bentuk formal	1. Penyajian transaksi secara wajar 2. Penyajian peristiwa lainnya.	Ordinal
	Periodisitas	1. Periode pelaporan	Ordinal
	Konsistensi	1. Penerapan metode akuntansi	Ordinal
	Pengungkapan lengkap	1. Kelengkapan informasi laporan keuangan	Ordinal
	Penyajian laporan keuangan	1. Penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitan, dan catatan atas laporan keuangan	Ordinal
Variabel Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Relevan	1. Memiliki manfaat umpan balik 2. Memiliki manfaat prediktif 3. Tepat waktu 4. Lengkap	Ordinal
	Andal	1. Tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan kesalahan material 2. Penyajian jujur 3. Dapat diverifikasi	Ordinal

	Dapat dibandingkan	1. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya	Ordinal
	Dapat dipahami	1. Mengandung pengetahuan yang memadai	Ordinal

Sumber : PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam operasional variabel ini, semua variabel menggunakan skala ordinal. Pengertian skala ordinal menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie dalam Nurlaila (2014:48) yaitu sebuah skala yang tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan diantara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkannya dalam beberapa cara yang berarti.

3. Pengukuran Variabel

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengukur variabel adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden yang berisi pertanyaan-pernyataan untuk variabel X dan variabel Y.
- b. Setelah semua kuesioner terkumpul, data tersebut dikelompokkan menurut kelompok variabel masing-masing, lalu dilanjutkan dengan memberikan skor untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan.
- c. Untuk memperoleh data tentang Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dibuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. Menurut Kinnear dalam Husein Umar (2014:70) skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Sugiyono (2013:134) menyatakan

bahwa dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

- d. Menghitung besarnya tingkat variabel X (Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) dan variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dengan cara mencari rata-rata (*mean*) dari kedua variabel tersebut. Rumus rata-rata (*mean*) yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{\sum x_i}{n} \qquad y = \frac{\sum y_i}{n}$$

Keterangan: x = Nilai rata-rata variabel x
 y = Nilai rata-rata variabel y
 Σ = sigma (jumlah)
 n = jumlah kelas
 x_i, y_i = Nilai dari *i* sampai ke-n

(Irwana dalam Nurlaila, 2014:51).

Dalam skala Likert jawaban yang dikumpulkan dari pertanyaan atau pernyataan setiap itemnya akan diberi bobot sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pemberian Skor Jawaban

Kode	Pilihan Jawaban	Skor Penilaian
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TD	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

- e. Langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria pengklasifikasian untuk variabel X dan variabel Y yang mengacu pada ketentuan yang dikemukakan oleh Husein Umar (2014:164) dimana rentang skala dicari dengan rumus:

$$RS = \frac{n(m-1)}{m}$$

Keterangan:

RS = rentang skala

n = jumlah sampel

m = jumlah alternatif jawaban tiap item

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden, maka rentang skala yaitu :

$$RS = \frac{30(5-1)}{5} = 24$$

Rentang pengklasifikasian setiap kategori untuk variabel X (Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) dan variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan) dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Kriteria Rentang Pengklasifikasian

Variabel	Kategori	Rentang Pengklasifikasian
Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	Sangat tidak efektif	30-54
	Kurang efektif	55-79
	Cukup efektif	80-104
	Efektif	105-129
	Sangat efektif	130-154
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Sangat tidak berkualitas	30-54
	Kurang berkualitas	55-79
	Cukup berkualitas	80-104
	Berkualitas	105-129
	Sangat berkualitas	130-154

Sumber: Data diolah 2018

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek dalam penelitian atau sering disebut sebagai wilayah generalisasi subjek/objek dalam penelitian dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dimiliki untuk dijadikan sebagai patokan bagi peneliti dalam menarik sebuah kesimpulan yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2013:119) Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan unsur secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pimpinan dan staf pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan kurang lebih jumlahnya 70 orang.

2. Sampel

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi penelitian yang secara representative mampu mewakili populasinya. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2013:119) Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Baik sampel yang diambil secara acak maupun yang ditentukan sesuai dengan tema yang dipilih. Sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yakni penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang yang merupakan staf bagian keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu pernyataan (*statement*) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya yang dilakukan dalam rangka memperoleh informasi yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan. Tentang metode pengumpulan data dan penggunaan instrument dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010:28) "Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden". Suatu metode atau cara yang digunakan dengan tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan bagian keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan terkait dengan berbagai unsur dalam penelitian yang dilakukan. Serta dengan menggunakan metode angket, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan karyawan atau staf pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan langsung oleh peneliti kepada responden. Responden mengisi kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti. Setelah pengisian kuesioner yang telah dibagikan, selanjutnya dikumpulkan kembali dan diolah.

2. Studi Pustaka

Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010:28) Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan unsur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Menganalisisnya untuk dijadikan sebagai

pembandingan sekaligus penguat atas penelitian yang dilakukan. Serta dijadikan sebagai pembandingan antara teori yang ada dengan realita yang peneliti peroleh di lapangan.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel terikat. Adapun metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi. Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010:210) Analisis Korelasi dan Regresi adalah analisis yang mencari hubungan dan pengaruh antara variabel satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) merupakan variabel *independent* dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) merupakan variabel *dependent* sehingga persamaan regresi linier dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier sederhana.

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan tetapi juga menduga besarnya arah hubungan itu serta menduga besarnya variabel dependen jika nilai variabel independen diketahui. Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan yaitu mengetahui pengaruh Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan.

Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X : Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

a : Konstanta

b : Parameter yang diestimasi untuk X

b. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan Koefisien Determinasi (R^2). Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependent. Besarnya koefisien determinasi dapat dilihat pada r square dan dinyatakan dalam presentase. Model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisien determinasi ($KD = r^2 \times 100\%$) semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1 maka model regresi semakin

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi- Selatan

Sebelum tahun 1972, Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian pada biro keuangan sekretariat wilayah daerah tingkat I Sulawesi-selatan dengan nama bagian penghasilan daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luas daerah kerja, urusan- urusan yang menyangkut pendapatan daerah, baik meliputi pendapatan asli daerah sendiri (pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan lainnya yang sah) maupun pendapatan Negara yang serahkan kepada daerah tingkat I sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari sekretariat daerah tingkat I sul-sel dan bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Sulawesi selatan Nomor : 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah tingkat I Sulawesi selatan.

Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna dinas pendapatan daerah, perlu dikembangkan pengelolaannya baik pelayanan pada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan daerah.

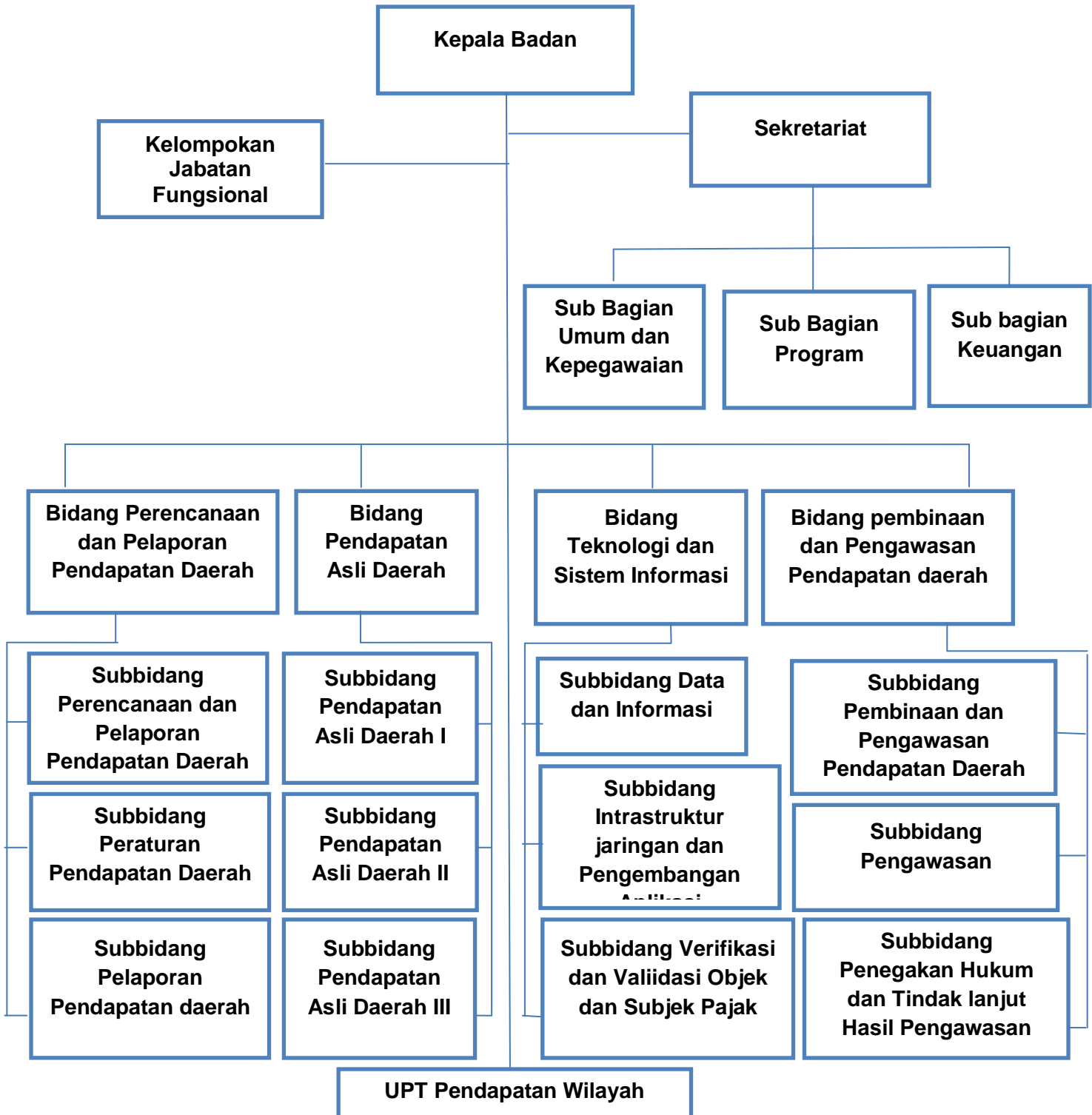
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas- tugas operasional pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah bisa ditangani langsung dengan baik oleh dinas pendapatan daerah. Berdasarkan peraturan daerah No.II tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah provinsi sul-sel No.8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi sul-sel yang kemudian ditidakklanjuti dengan peraturan gubernur sul-sel NO.16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknik dinas (UPTD) pada dinas pendapatan daerah provinsi sul-sel. dengan dasar hukum tersebut terbentuklah 15 UPTD di kabupaten/kota se-sulawesi-selatan. Sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 25 UPTD yang tersebar di 24 kabupaten /kota Sulawesi selatan.

Pada tahun 2016 dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi-selatan berganti nama menjadi badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi-selatan merujuk pada badan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengamanahkan peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang ada akhirnya ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur Sulawesi selatan Nomor 99 tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan pendapatan daerah provinsi sulawwesi selatan.

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

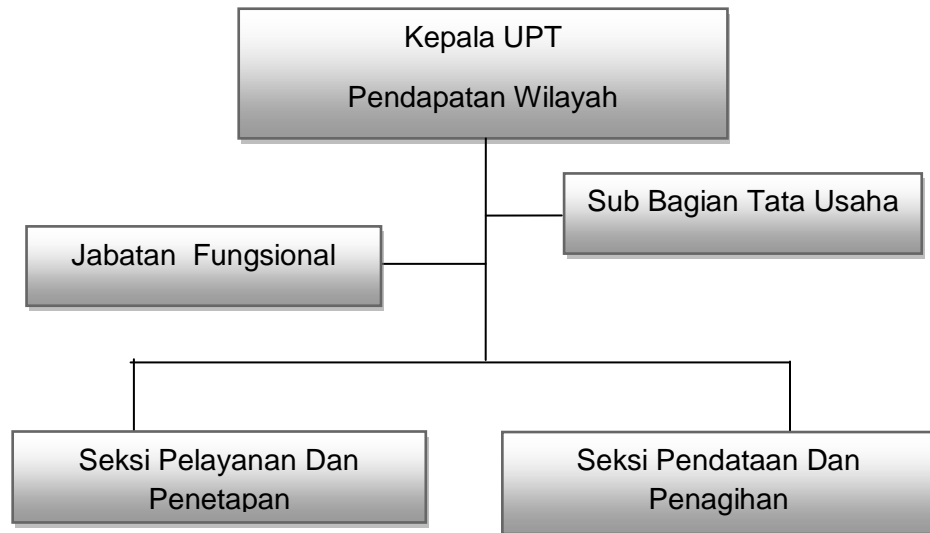
Bagan struktur organisasi lingkup Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi selatan



Gambar 4.1 Bagan Struktur Unit Pelayanan

Teknis pendapatan wilayah:



Gambar 4.2 Badan Pendapatan Daerah

1. *Job Description*

Tugas dan fungsi dan kewenangan unit dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala badan mempunyai tugas penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah. Kepala badan dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsinya :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah.

- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan pengelolaan pendapatan daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan:

- 2) pengordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3) pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan ; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sekretariat, meliputi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengavaluasi pelaksanaan tugas dalam sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas ;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas ;
- 5) Mengikuti rapat- rapat sesuai tugasnya;

Subbagian di dalam sekretariat , adalah :

- 1) Subbagian program yang dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretariat dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan;
- 2) Subbagian umum dan kepegawaian yang dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretariat dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang , urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

sekertariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

- 3) Subbagian keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu secretarias dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah

Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan, kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas diatas, kepala bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan dan peraturan pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan dan peraturan pendapatan daerah;

Uraian tugas Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah meliputi ;

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman dan pelaksanaan tugasnya.

2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas.

Sub bagian di dalam Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, adalah Subbidang perencanaan dan pendapatan daerah dipimpin oleh kepala subbidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan pendapatan daerah;

4. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang pendapatan asli daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud diatas, maka kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi;

1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah;

2) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah;

- 3) Pelaksanaan evaluasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah;
- 4) Pelaksanaan pembinaan,koordinasi pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;

Uraian tugas bidang pendapatan asli daerah,meliputi;

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pendapatan asli daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau,mengawasi dan mengavaluasi dan pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pendapatan asli daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

Sub bidang didalam pendapatan asli daerah,adalah Subbidang pendapatan asli daerah I di pimpin oleh kepala subbidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang pendapatan asli daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah I meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

5. Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi

Bidang teknologi dan sistem informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengolahan daerah,koordinasi,pembinaan dan pengelolaan data informasi,

infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi objek dan subjek pajak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka kepala bidang teknologi dan sistem informasi mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.
- 4) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Bidang Teknologi dan Sistem Informasi, meliputi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang teknologi dan sistem informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.

- 3) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas.
- 4) Memantau,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam perkembangan Bidang Teknologi dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- 5) Menyusun rencana,mengoreksi,menaraf dan menandatangani naskah dinas.
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Subbidang di dalam Bidang Teknologi dan Sistem Informasi :

- 1) Subbidang data dan informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang data dan informasi.
- 2) Subbidang infrasktruktur,jaringan,dan pengembangan aplikasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.

6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Bidang pembinaan dan pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawsan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan,sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.
- 4) Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Bidang Pembinaan dan Pengawasan “

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- 3) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- 4) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

- 5) Melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan teknis pemungutan pendapatan asli daerah dalam lingkup pemerintah daerah.

Subbidang di dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan, adalah :

- 1) Subbidang pengawasan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan bidang pengawasan.
- 2) Subbidang hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan pengelolaan pendapatan daerah bidang penegakan hukum dan tindak lanjut hasil pengawasan.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Pengangkatan jabatan fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta ketentuan perundang-undangan.

8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah

Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pendapatan wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendapatan Wilayah yang bertugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi Kepala UPT dalam melaksanakan tugas adalah, Sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Pelaksanaan administrasi UPT.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala UPT Wilayah, meliputi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah pada dasarnya tidak terlepas dari visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 yaitu “Sulawesi Selatan sebagai pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Kesejahteraan pada Tahun 2018.

Adapun visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah : “TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG MAKSIMAL MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSIH, TETIB, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN INOVATIF”. Visi ini disusun atas dasar komitmen seluruh anggota organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat Sulawesi selatan dalam rangka mewujudkan sistem pengolahan pendapatan daerah yang mengacu pada tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10% (sepuluh persen) per tahun.

- b) Meningkatkan kapasitas,efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- c) Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal,jujur,bertanggung jawab dan professional dalam mengelola pendapatan daerah.
- d) Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Deskriptif Data Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 30 eksemplar. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang diteliti, dilakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti.

a. Jenis Kelamin

Dekskripsi karakteristik responden menurut jenis kelamin (gender), yaitu pengelompokan responden menurut laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui tingkat proporsi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dapat disajikan melalui tabel 4.1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	17	56,7%
Perempuan	13	43,3%
Total	30	100 %

Sumber : Pengolahan Data Primer

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah secara keseluruhan sebesar 30 orang yang merupakan staf bagian keuangan. Data tersebut menunjukkan bahwa responden laki-laki sebesar 17 orang atau 56,7% dan responden perempuan sebesar 13 orang atau 43,3%.

b. Pendidikan Terakhir

Dekskripsi pendidikan responden menjelaskan uraian tingkat pendidikan responden, sehingga dalam dekskripsi pendidikan

responden maka dapat dikelompokkan yaitu: Diploma, Sarjana dan Pascasarjana. Untuk lebih jelasnya akan disajikan proporsi presentase responden menurut tingkat pendidikan yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
D3	0	0 %
S1	27	90 %
S2	3	10 %
Total	30	100 %

Sumber : Pengolahan Data Primer

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan responden yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan secara langsung didominasi bergelar S1 yaitu sebesar 27 orang (90%) dan S2 sebanyak 3 orang (10%), dan tidak ada orang (0%) bergelar D3. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan lebih tinggi memiliki ilmu dan pemahaman yang lebih luas, yang dalam hal ini pendidikan tertinggi tersebut adalah S1 dan S2 yang mayoritas digunakan jasanya dalam menyusun laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan.

c. Usia

Dekskripsi usia responden menjelaskan uraian tingkat usia responden, sehingga dalam dekskripsi usia responden maka dapat dikelompokkan yaitu: lebih kecil dari 30 tahun, 30 tahun sampai 45 tahun dan 46 sampai 55 tahun. Untuk lebih jelasnya akan disajikan proporsi presentase responden menurut usia yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
≤ 30	9	30 %
30 – 45	15	50 %
46 – 55	6	20 %
Total	30	100 %

Sumber : Pengolahan Data Primer

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang merupakan penyusun laporan keuangan mayoritas berusia sekitar 30-45 tahun yaitu sebanyak 15 responden (50%), dimana pada usia tersebut merupakan usia dengan pemikiran yang matang dalam menganalisa dan berani mengambil resiko. Sementara itu, sebanyak 9 responden (30%) berusia 30 tahun ke bawah, dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut merupakan usia yang pemikirannya masih jernih dan secara psikologi cenderung emosional. Adapun sebanyak 6 (20%) responden berusia 46-55 tahun, dimana dalam usia tersebut memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Meskipun begitu, penempatan posisi sebagai penyusun laporan keuangan pada instansi pemerintahan, tidak dipengaruhi oleh faktor usia. Usia hanya sebagai faktor penunjang untuk informasi dari responden.

d. Lama Bekerja

Dekskripsi karakteristik responden menurut lamanya bekerja yaitu pengelompokan responden yang bekerja kurang dari 10 tahun, 10 sampai 25 tahun dan 26 sampai 35 tahun. Untuk mengetahui tingkat proporsi lamanya bekerja, dapat disajikan melalui tabel 4.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4
Lama Bekerja Responden

Waktu kerja (Tahun)	Frekuensi	Persentase
≤ 10	14	46,66 %
10 – 25	11	36,66 %
26 – 35	5	16,66 %
Total	30	100 %

Sumber : Pengolahan Data Primer

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang bekerja ≤ 10 yakni 14 orang (46,66%), 10 – 25 sebesar 11 orang (36,66%) dan 26 – 35 sebesar 5 orang (16,66%). Data tersebut menunjukkan bahwa lamanya bekerja responden didominasi oleh responden yang bekerja kurang dari 10 tahun.

2. Deskripsi Data Variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

Tabel 4.5
Deskripsi Jawaban Variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

Indikator	No.Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS	Total
Penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas	1	12	16	2	0	0	30
	2	12	15	3	0	0	30
	3	10	18	2	0	0	30
Penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan	4	10	17	3	0	0	30
	5	10	16	4	0	0	30
	6	11	14	5	0	0	30
Penilaian Aset	7	13	11	4	2	0	30
Penilaian Kewajiban	8	11	15	4	0	0	30
Penyajian Wajar Transaksi	9	12	8	8	2	0	30
Penyajian Wajar Peristiwa Lain	10	12	12	6	0	0	30
Periode Pelaporan	11	12	13	5	0	0	30
Penerapan Metode Akuntansi	12	13	14	3	0	0	30
Kelengkapan Informasi	13	14	8	8	0	0	30

Laporan Keuangan							
Penyajian Wajar Laporan Keuangan	14	14	11	5	0	0	30
Total		166	188	62	4	0	420
Persentase		39,5 %	44,8 %	14,8 %	0,9%	0%	100%

Sumber : Pengolahan Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencapai 166 tanggapan atau 39,5% seluruhnya diterapkan, 188 tanggapan atau 44,8% menyatakan sebagian besar diterapkan, 62 tanggapan atau sebesar 14,8% kadang-kadang menerapkan, 4 tanggapan atau 0,9% sebagian kecil menerapkan, dan 0 tanggapan lainnya atau 0% belum menerapkan beberapa indikator Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya mengenai penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas pada neraca dengan alasan bahwa basis akuntansi yang digunakan masih bersifat semi akrual atau masa transisi dari basis kas menuju basis akrual. Dari hasil tabel tersebut, dapat ditentukan kriteria pengklasifikasian untuk variabel X .

Tabel 4.6
Klasifikasi Skor Jawaban Responden mengenai Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan (Variabel X)

Indikator	No. Prty.	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
Penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas	1	130	150	87	Sangat Efektif
	2	131	150	87	Sangat Efektif
	3	134	150	89	Sangat Efektif
Penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan, biaya, dan pembiayaan.	4	127	150	85	Efektif
	5	126	150	84	Efektif
	6	126	150	84	Efektif
Penilaian aset	7	125	150	83	Efektif
Penilaian kewajiban	8	127	150	85	Efektif
Penyajian wajar transaksi	9	120	150	80	Efektif
Penyajian wajar peristiwa lain	10	126	150	84	Efektif
Periode pelaporan	11	127	150	85	Efektif
Metode akuntansi	12	130	150	87	Sangat Efektif
Kelengkapan informasi laporan keuangan	13	126	150	84	Efektif
Penyajian wajar laporan keuangan	14	129	150	86	Efektif
Rata-Rata		127	150	85	Efektif

Rentang Pengklarifikasian:

Sangat Tidak Efektif : 30 - 54

Kurang Efektif : 55 – 79

Cukup Efektif : 80 – 104

Sumber : *Pengolahan Data Primer 2018*

Efektif : 105 - 129

Sangat Efektif : 130 - 154

Hasil perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata variabel X sebesar 127.

Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka nilai rata-rata variabel X tersebut berada pada interval 105-129 yang berarti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masuk dalam kategori "Efektif". Standar Akuntansi Pemerintah yang masuk kategori efektif adalah akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik oleh karena Standar Akuntansi Pemerintah sangat erat kaitannya dengan kualitas laporan keuangan dalam suatu perusahaan/ instansi.

3. Dekripsi Data Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Y)

Tabel 4.7
Deskripsi Jawaban Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Indikator	No. Prty.	SS	S	KS	TS	STS	Total
Laporan keuangan memiliki manfaat umpan balik	15	14	12	4	0	0	30
Laporan keuangan memiliki manfaat prediktif	16	9	16	3	0	0	30
Penyajian tepat waktu	17	10	17	3	0	0	30
Penyajian lengkap	18	11	13	6	0	0	30
Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan kesalahan material	19	11	15	3	1	0	30
Penyajian jujur	20	12	10	8	0	0	30
Dapat diverifikasi	21	13	6	11	0	0	30
Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya	22	10	14	6	0	0	30
Laporan keuangan mengandung informasi yang memadai	23	12	16	2	0	0	30
Total		102	159	46	1	0	308
Persentase		33,1 %	51,6 %	15%	0,3%	0%	100 %

Sumber : Pengolahan Data Primer 2018

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan seluruhnya diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sebanyak 102 atau 33.1% tanggapan menyatakan telah menerapkan secara keseluruhan, penerapan sebagian besar sebesar 159 atau 51,6% tanggapan, kadang-kadang-kadang diterapkan sebesar 46 atau 15% tanggapan, sebagian kecil diterapkan sebesar 1 atau 0,3% tanggapan, dan 0 atau 0% tanggapan belum menerapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal

laporan keuangan yang memiliki manfaat prediktif, kelengkapan, dan kesalahan informasi yang disajikan. Namun persentase tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan laporan keuangan daerah yang disajikan. Dari hasil tersebut dapat ditentukan kriteria pengklasifikasian untuk variabel Y.

Tabel 4.8
Klasifikasi Skor Jawaban Responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Y)

Indikator	No. Prty.	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
Laporan Keuangan memiliki manfaat umpan balik	15	130	150	87	Sangat Berkualitas
Laporan keuangan memiliki manfaat prediktif	16	118	150	79	Berkualitas
Penyajian tepat waktu	17	127	150	85	Berkualitas
Penyajian lengkap	18	125	150	83	Berkualitas
Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan kesalahan material	19	126	150	84	Berkualitas
Penyajian jujur	20	124	150	83	Berkualitas
Dapat diverifikasi	21	122	150	81	Berkualitas
Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya	22	124	150	83	Berkualitas
Laporan keuangan mengandung informasi yang memadai	23	130	150	87	Sangat Berkualitas
Rata-Rata		125	150	84	Berkualitas

Rentang Pengklarifikasian:

Sangat Tidak Berkualitas : 30 - 54

Kurang Berkualitas : 55 – 79

Cukup Berkualitas : 80 – 104

Berkualitas : 105 - 129

Sangat Berkualitas : 130 - 154

Sumber : Pengelolaan Data Primer, 2018

Hasil perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata variabel Y sebesar 125. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka nilai rata-rata variabel Y tersebut berada dalam interval 105-129 yang berarti kualitas laporan keuangan termasuk dalam kategori

“Berkualitas”. Laporan keuangan yang berkualitas tentu memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan suatu perusahaan/ instansi. Informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Hasil yang ditunjukkan dari uji validitas ini akan menggambarkan valid atau tidaknya instrument yang diajukan di dalam kuesioner. Instrumen pertanyaan yang diajukan dalam koesioner harus bersifat valid karena pertanyaan itu harus mencerminkan variabel yang ingin diteliti. Hasil uji validitas dari setiap variabel di dalam penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,683	0,361	Valid
X1.2	0,535	0,361	Valid
X1.3	0,363	0,361	Valid
X1.4	0,413	0,361	Valid
X1.5	0,603	0,361	Valid
X1.6	0,375	0,361	Valid
X1.7	0,377	0,361	Valid
X1.8	0,467	0,361	Valid
X1.9	0,366	0,361	Valid
X1.10	0,707	0,361	Valid
X1.11	0,592	0,361	Valid
X1.12	0,736	0,361	Valid
X1.13	0,423	0,361	Valid
X1.14	1	0,361	Valid
Y1.1	0,453	0,361	Valid
Y1.2	0,515	0,361	Valid
Y1.3	0,373	0,361	Valid
Y1.4	0,406	0,361	Valid
Y1.5	0,598	0,361	Valid

Y1.6	0,740	0,361	Valid
Y1.7	0,514	0,361	Valid
Y1.8	0,363	0,361	Valid
Y1.9	1	0,361	Valid

Sumber: Data Diolah, 2018

Untuk mengetahui tingkat validitas suatu data, maka besarnya nilai r hitung $>$ r tabel. r tabel dalam penelitian ini sebesar 0,361 karena jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30, untuk mendapat r tabel dilakukan derajat kebebasan (*degree of freedom*-df) diperoleh dari jumlah sampel atau responden dikurangi 2 ($df = N - 2$). Dengan demikian melalui proses statistik didapat r tabel sebesar 0,361.

b. Uji Reliabilitas

Hasil yang ditunjukkan dari uji reliabilitas akan menunjukkan suatu data memiliki keandalan atau jawaban responden konsisten dengan pertanyaan yang diajukan. Hasil uji reliabilitas dari penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ketentuan	Keterangan
X	0,943	0,6	Reliable
Y	0,886	0,6	Reliable

Sumber: Data Diolah, 2018

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu data maka besarnya koefisien Alpha Cronbach $>$ 0,6. Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel di dalam penelitian ini bersifat reliable karena koefisien Cronbach Alpha $>$ 0,6.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear sederhana yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2) dan uji-t.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut hasil output dari metode statistik yang diolah melalui *software SPSS 23.0 for windows*.

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,409 ^a	,167	,137	4,38824	,167	5,623	1	28	,025	,606

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, nilai R sebesar 0,409 menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan variabel kualitas laporan keuangan sebesar 40,9% dan selebihnya 59,1% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal auditor, dan lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji-t

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (X) secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil output yang dihasilkan dari metode statistik yang diolah melalui *software SPSS 23.0 for windows*.

Tabel 4.12

Uji-t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,221	10,004		1,422	,166
	Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	,343	,144	,409	2,371	,025

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 14,221 + 0,343 X$$

Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (β_0) adalah sebesar 14,221. Hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mempengaruhi, maka Kualitas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan sebesar 14,221. Dari hasil uji regresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa nilai koefisien Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) sebesar 0,343 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), dimana t-hitung lebih besar dari t tabel ($2,371 > 2,048$) dengan tingkat sig lebih kecil dari 0,05 (0,025

<0,05). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah naik sebesar 0,343 dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan daerah.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan untuk menguji efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah efektif. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai rata-rata variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) sebesar 127 yang apabila dikaitkan dengan kategori yang telah ditentukan, maka nilai rata-rata variabel tersebut berada dalam interval nilai 105-129 yang berarti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masuk dalam kategori "Efektif". Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan sudah baik.

2. Hasil Uji Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan untuk menguji kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan instansi pemerintah yang berada dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan sudah berkualitas. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai rata-rata variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 125. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan, maka nilai rata-rata variabel Y tersebut berada dalam interval nilai 105-129 yang berarti kualitas laporan keuangan Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan masuk dalam kriteria "Berkualitas". Laporan keuangan pada dasarnya harus memiliki kualitas informasi atau karakteristik kualitatif agar dapat memberikan informasi yang berkualitas tinggi bagi para pemakainya seperti: 1) Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 2) Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 3) Keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 4) Dapat dibandingkan. Implikasi penting dari karakteristik

kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Laporan Keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan sudah baik karena sudah masuk dalam kategori berkualitas.

3. Hasil Uji Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan antara Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel X terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel Y menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel X sebesar 0,343, nilai t-hitung sebesar 2,371 lebih besar dari t-tabel yaitu 2,048 (dimana df yaitu 28, signifikan 5%) dan nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$ dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,409 sehingga menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Penerapan Standara Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian SAP merupakan

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain itu dari hasil penelitian Eka Danofi (2013:80) mengemukakan bahwa adanya pengaruh atas Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik pemahaman serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan pusat dan daerah, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Hasil penelitian ini kurang lebih sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2014) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kabupaten Enrekang yang menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki Pengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui observasi dan penyebaran kuesioner, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan sudah efektif karena tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.
2. Laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan yang dilaporkan setiap tahunnya juga sudah baik atau berkualitas. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.
3. Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu $2,371 > 2,048$ dengan

tingkat signifikan sebesar 0,025 ($0,025 < 0,05$). Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran pada seluruh instansi pemerintahan khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan

1. Untuk terus memperhatikan pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan khususnya pegawai yang berperan langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan.
2. Teori maupun praktek yang telah menggunakan sistem perangkat lunak (*software*) dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang dibuatnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
3. Untuk mengatur kualitas laporan keuangan pemerintah mampu menyediakan standar akuntansi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Prasetyo dan Jannah, Lina Miftahul. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dhedy Triwardana, 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan System Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)* Vol. 4 No. 1
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi. Edisi Revisi. Cet.11*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Melisa Mamesah, 2013. *Penerapan PSAK No.45 Pada Gmim Efrata Sentrum Sonder Kaintannya Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Vol. 1 No. 4.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Ningtys,Pravitasari Eka, 2015. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Vol.4 No.1.
- Nurlaila. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*. (<http://repository.unhas.ac.id> diakses 31 Oktober 2017).
- Nordiawan, D Putra I. S. Dan Rahmawati M. 2008 *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba empat : Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2011. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan.Cet.1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramadhan, Eka Danofi. 2013. *Pengaruh Pemahaman atas Penerapan Standar sAkutansi Pemezrintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.(<http://repository.upi.edu> diakses pada 30 Oktober 2017).
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiiah. 2010. *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif dan RD. Cet. 18*. Bandung : Alfabeta.

Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.
Ed.2,Cet.13. Jakarta : Rajawali Pers.

DAFTAR LAMPIRAN

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) .

```

Regression

Notes

Output Created		24-MAY-2018 12:12:28
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3).
Resources	Processor Time	00:00:02,78
	Elapsed Time	00:00:02,59
	Memory Required	2400 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	680 bytes

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,409 ^a	,167	4,38824	,167	5,623	1	28	,025	,606

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	108,282	1	108,282	5,623	,025 ^b
	Residual	539,185	28	19,257		
	Total	647,467	29			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,221	10,004		1,422	,166
	Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	,343	,144	,409	2,371	,025

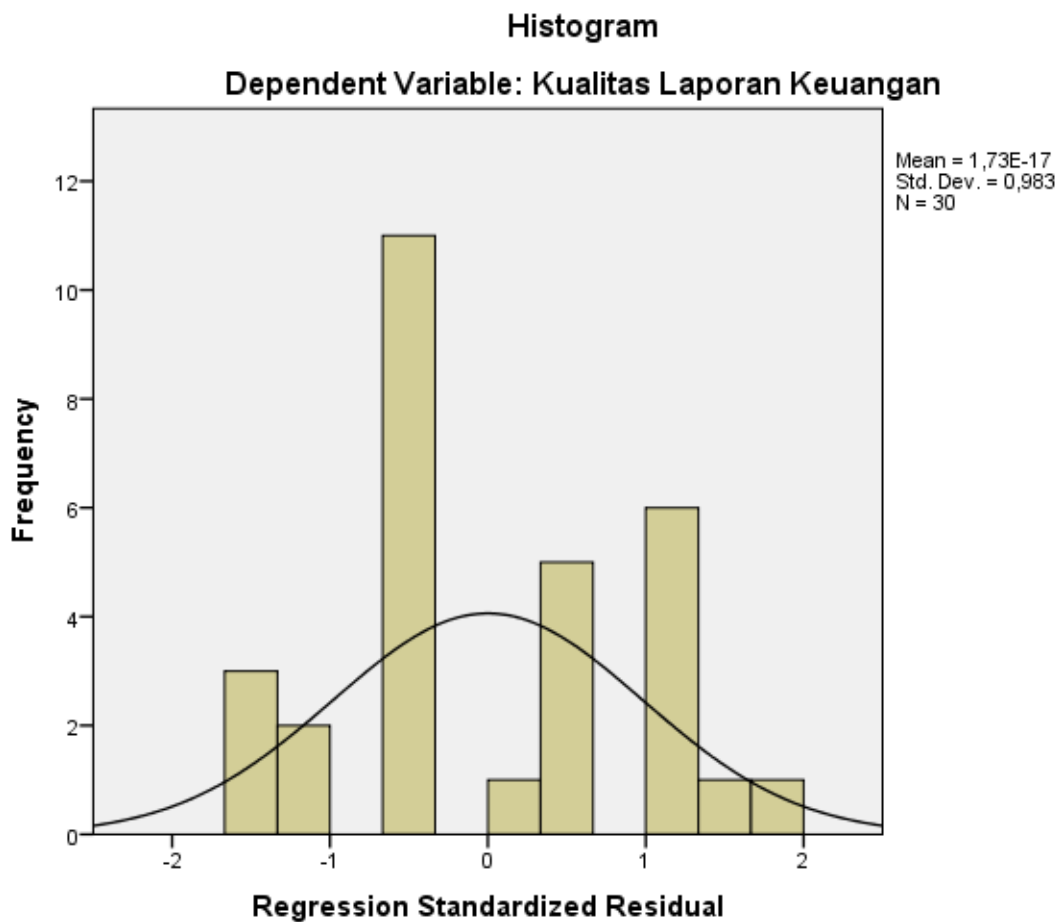
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	34,4301	40,2529	37,8667	1,93232	30
Residual	-6,91036	7,82979	,00000	4,31191	30
Std. Predicted Value	-1,778	1,235	,000	1,000	30
Std. Residual	-1,575	1,784	,000	,983	30

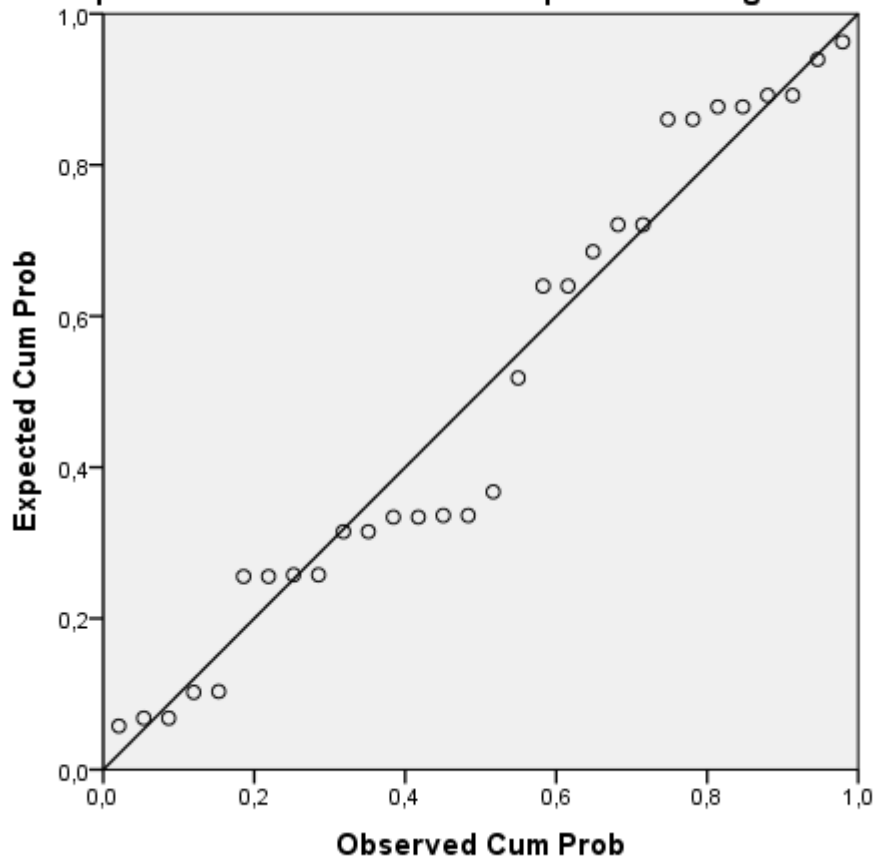
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Charts



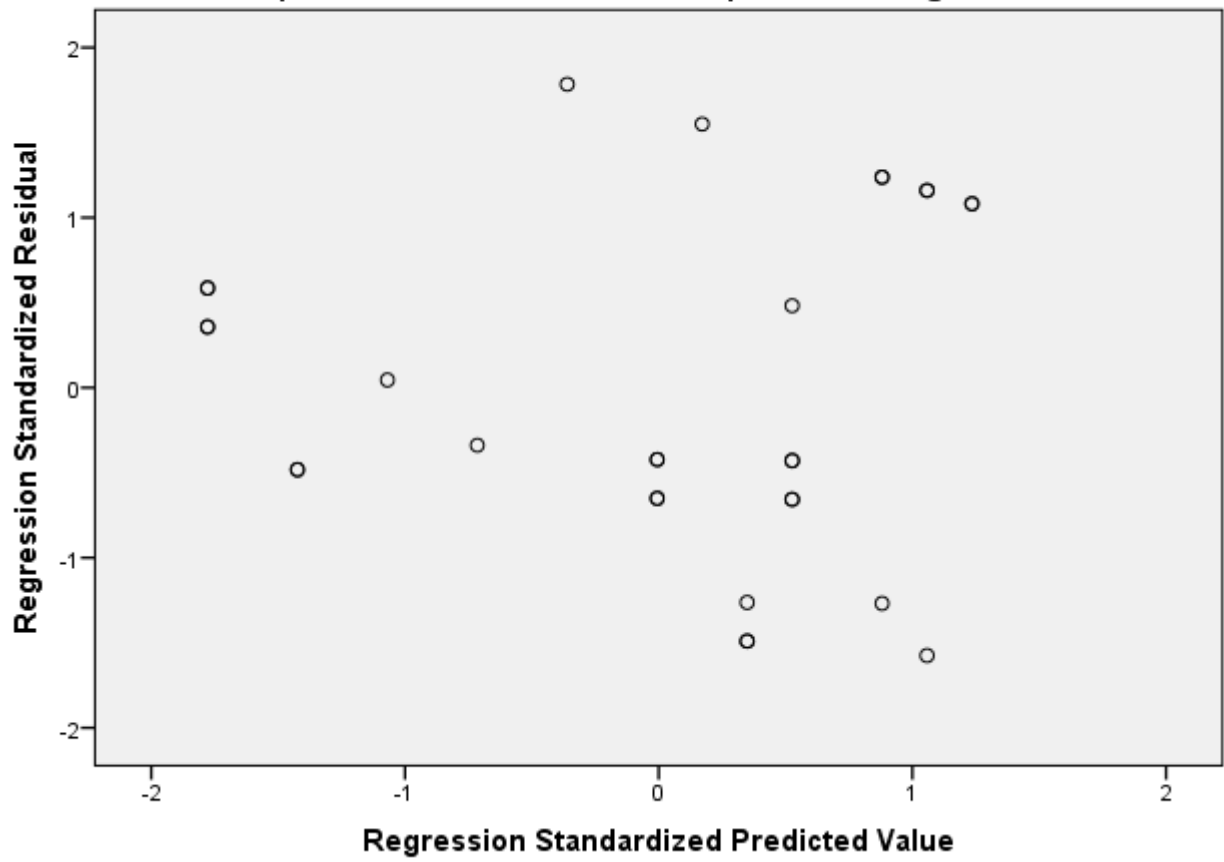
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan



Scatterplot

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan



CORRELATIONS

```

/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

Notes

Output Created		01-JAN-2009 00:55:49
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00.44
	Elapsed Time	00:00:00.62

	Sig. (2-tailed)	.350	.087	.001	.002	.016	.168	.003	.000	.000	.037	.007	.001		.020
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.14	Pearson Correlation	.683**	.535**	.363*	.213	.603**	.335	.277	.467**	.336	.707**	.592**	.736**	.423*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.049	.258	.000	.071	.138	.009	.070	.000	.001	.000	.020	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

Notes

Output Created		01-JAN-2009 00:57:39
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.

Y1.6	Pearson Correlation	.513**	.408*	.408*	.470**	.343	1	.790**	.430*	.740**
	Sig. (2-tailed)	.004	.025	.025	.009	.064		.000	.018	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y1.7	Pearson Correlation	.493**	.205	.205	.600**	.430*	.790**	1	.566**	.514**
	Sig. (2-tailed)	.006	.276	.276	.000	.018	.000		.001	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y1.8	Pearson Correlation	.443*	.307	.458*	.653**	.633**	.430*	.566**	1	.363*
	Sig. (2-tailed)	.014	.099	.011	.000	.000	.018	.001		.048
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y1.9	Pearson Correlation	.453*	.515**	.333	.406*	.598**	.740**	.514**	.363*	1
	Sig. (2-tailed)	.012	.004	.072	.026	.000	.000	.004	.048	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITY

```
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA  
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR COV  
/SUMMARY=TOTAL.
```

Reliability

Notes

Output Created		01-JAN-2009 00:58:53
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Matrix Input	
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.

Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR COV /SUMMARY=TOTAL.	
Resources	Processor Time		00:00:00.08
	Elapsed Time		00:00:00.08

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.938	.943	14

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4.3333	.60648	30
X1.2	4.2333	.67891	30
X1.3	4.2667	.58329	30
X1.4	4.2333	.62606	30
X1.5	4.2333	.67891	30
X1.6	4.2000	.71438	30
X1.7	4.1667	.91287	30
X1.8	4.2333	.67891	30
X1.9	3.9667	.99943	30
X1.10	4.2333	.77385	30
X1.11	4.2000	.71438	30
X1.12	4.3667	.66868	30
X1.13	4.2333	.85836	30
X1.14	4.3000	.74971	30

Inter-Item Correlation Matrix

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14
X1.1	1.000	.642	.422	.242	.726	.557	.457	.475	.417	.637	.637	.709	.177	.683
X1.2	.642	1.000	.708	.517	.925	.611	.547	.551	.622	.615	.754	.337	.318	.535
X1.3	.422	.708	1.000	.674	.708	.695	.432	.882	.548	.545	.861	.360	.560	.363
X1.4	.242	.517	.674	1.000	.517	.740	.473	.598	.399	.311	.432	.365	.537	.213
X1.5	.726	.925	.708	.517	1.000	.611	.491	.701	.673	.615	.825	.489	.436	.603
X1.6	.557	.611	.695	.740	.611	1.000	.582	.540	.396	.599	.595	.563	.259	.335
X1.7	.457	.547	.432	.473	.491	.582	1.000	.269	.724	.626	.370	.518	.521	.277
X1.8	.475	.551	.882	.598	.701	.540	.269	1.000	.520	.418	.825	.489	.673	.467
X1.9	.417	.622	.548	.399	.673	.396	.724	.520	1.000	.501	.493	.432	.653	.336
X1.10	.637	.615	.545	.311	.615	.599	.626	.418	.501	1.000	.724	.629	.382	.707
X1.11	.637	.754	.861	.432	.825	.595	.370	.825	.493	.724	1.000	.491	.484	.592
X1.12	.709	.337	.360	.365	.489	.563	.518	.489	.432	.629	.491	1.000	.567	.736
X1.13	.177	.318	.560	.537	.436	.259	.521	.673	.653	.382	.484	.567	1.000	.423
X1.14	.683	.535	.363	.213	.603	.335	.277	.467	.336	.707	.592	.736	.423	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14
X1.1	.368	.264	.149	.092	.299	.241	.253	.195	.253	.299	.276	.287	.092	.310
X1.2	.264	.461	.280	.220	.426	.297	.339	.254	.422	.323	.366	.153	.185	.272
X1.3	.149	.280	.340	.246	.280	.290	.230	.349	.320	.246	.359	.140	.280	.159
X1.4	.092	.220	.246	.392	.220	.331	.270	.254	.249	.151	.193	.153	.289	.100
X1.5	.299	.426	.280	.220	.461	.297	.305	.323	.456	.323	.400	.222	.254	.307
X1.6	.241	.297	.290	.331	.297	.510	.379	.262	.283	.331	.303	.269	.159	.179
X1.7	.253	.339	.230	.270	.305	.379	.833	.167	.661	.443	.241	.316	.408	.190
X1.8	.195	.254	.349	.254	.323	.262	.167	.461	.353	.220	.400	.222	.392	.238
X1.9	.253	.422	.320	.249	.456	.283	.661	.353	.999	.387	.352	.289	.560	.252
X1.10	.299	.323	.246	.151	.323	.331	.443	.220	.387	.599	.400	.325	.254	.410
X1.11	.276	.366	.359	.193	.400	.303	.241	.400	.352	.400	.510	.234	.297	.317
X1.12	.287	.153	.140	.153	.222	.269	.316	.222	.289	.325	.234	.447	.325	.369
X1.13	.092	.185	.280	.289	.254	.159	.408	.392	.560	.254	.297	.325	.737	.272
X1.14	.310	.272	.159	.100	.307	.179	.190	.238	.252	.410	.317	.369	.272	.562

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	54.8667	53.292	.680	.	.935
X1.2	54.9667	51.620	.779	.	.932
X1.3	54.9333	52.685	.786	.	.932
X1.4	54.9667	53.757	.603	.	.936
X1.5	54.9667	50.999	.848	.	.930
X1.6	55.0000	51.931	.703	.	.934
X1.7	55.0333	50.447	.648	.	.936
X1.8	54.9667	51.964	.741	.	.933
X1.9	55.2333	49.013	.691	.	.936
X1.10	54.9667	50.861	.745	.	.932
X1.11	55.0000	50.897	.812	.	.931
X1.12	54.8333	52.626	.681	.	.934
X1.13	54.9667	51.413	.612	.	.937
X1.14	54.9000	52.369	.622	.	.936

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
59.2000	59.683	7.72546	14

RELIABILITY

/VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA

/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR COV

/SUMMARY=TOTAL.

Reliability

Notes

Output Created		01-JAN-2009 00:59:56
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Matrix Input	
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR COV /SUMMARY=TOTAL.

Resources	Processor Time	00:00:00.03
	Elapsed Time	00:00:00.05

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.884	.886	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1.1	4.3333	.71116	30
Y1.2	4.2333	.62606	30
Y1.3	4.2333	.62606	30
Y1.4	4.1667	.74664	30
Y1.5	4.2000	.76112	30

Y1.6	4.1333	.81931	30
Y1.7	4.1000	.88474	30
Y1.8	4.1333	.73030	30
Y1.9	4.3333	.60648	30

Inter-Item Correlation Matrix

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9
Y1.1	1.000	.594	.284	.281	.255	.513	.493	.443	.453
Y1.2	.594	1.000	.736	.430	.405	.408	.205	.307	.515
Y1.3	.284	.736	1.000	.652	.261	.408	.205	.458	.333
Y1.4	.281	.430	.652	1.000	.485	.470	.600	.653	.406
Y1.5	.255	.405	.261	.485	1.000	.343	.430	.633	.598
Y1.6	.513	.408	.408	.470	.343	1.000	.790	.430	.740
Y1.7	.493	.205	.205	.600	.430	.790	1.000	.566	.514
Y1.8	.443	.307	.458	.653	.633	.430	.566	1.000	.363
Y1.9	.453	.515	.333	.406	.598	.740	.514	.363	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9
Y1.1	.506	.264	.126	.149	.138	.299	.310	.230	.195
Y1.2	.264	.392	.289	.201	.193	.209	.114	.140	.195
Y1.3	.126	.289	.392	.305	.124	.209	.114	.209	.126
Y1.4	.149	.201	.305	.557	.276	.287	.397	.356	.184
Y1.5	.138	.193	.124	.276	.579	.214	.290	.352	.276
Y1.6	.299	.209	.209	.287	.214	.671	.572	.257	.368

Y1.7	.310	.114	.114	.397	.290	.572	.783	.366	.276
Y1.8	.230	.140	.209	.356	.352	.257	.366	.533	.161
Y1.9	.195	.195	.126	.184	.276	.368	.276	.161	.368

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	33.5333	18.395	.561	.729	.877
Y1.2	33.6333	18.723	.593	.854	.875
Y1.3	33.6333	18.930	.552	.859	.878
Y1.4	33.7000	17.459	.691	.764	.866
Y1.5	33.6667	18.023	.576	.756	.876
Y1.6	33.7333	16.823	.719	.876	.864
Y1.7	33.7667	16.668	.675	.858	.869
Y1.8	33.7333	17.651	.675	.764	.868
Y1.9	33.5333	18.395	.685	.781	.869

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
37.8667	22.326	4.72509	9

Tabel r (Koefisien Korelasi Sederhana)
df = 1 - 200

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Tabel r untuk df = 101 - 150

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
101	0.1630	0.1937	0.2290	0.2528	0.3196
102	0.1622	0.1927	0.2279	0.2515	0.3181
103	0.1614	0.1918	0.2268	0.2504	0.3166
104	0.1606	0.1909	0.2257	0.2492	0.3152
105	0.1599	0.1900	0.2247	0.2480	0.3137
106	0.1591	0.1891	0.2236	0.2469	0.3123
107	0.1584	0.1882	0.2226	0.2458	0.3109
108	0.1576	0.1874	0.2216	0.2446	0.3095
109	0.1569	0.1865	0.2206	0.2436	0.3082
110	0.1562	0.1857	0.2196	0.2425	0.3068
111	0.1555	0.1848	0.2186	0.2414	0.3055
112	0.1548	0.1840	0.2177	0.2403	0.3042
113	0.1541	0.1832	0.2167	0.2393	0.3029
114	0.1535	0.1824	0.2158	0.2383	0.3016
115	0.1528	0.1816	0.2149	0.2373	0.3004
116	0.1522	0.1809	0.2139	0.2363	0.2991
117	0.1515	0.1801	0.2131	0.2353	0.2979
118	0.1509	0.1793	0.2122	0.2343	0.2967
119	0.1502	0.1786	0.2113	0.2333	0.2955
120	0.1496	0.1779	0.2104	0.2324	0.2943
121	0.1490	0.1771	0.2096	0.2315	0.2931
122	0.1484	0.1764	0.2087	0.2305	0.2920
123	0.1478	0.1757	0.2079	0.2296	0.2908
124	0.1472	0.1750	0.2071	0.2287	0.2897
125	0.1466	0.1743	0.2062	0.2278	0.2886
126	0.1460	0.1736	0.2054	0.2269	0.2875
127	0.1455	0.1729	0.2046	0.2260	0.2864
128	0.1449	0.1723	0.2039	0.2252	0.2853
129	0.1443	0.1716	0.2031	0.2243	0.2843
130	0.1438	0.1710	0.2023	0.2235	0.2832
131	0.1432	0.1703	0.2015	0.2226	0.2822
132	0.1427	0.1697	0.2008	0.2218	0.2811
133	0.1422	0.1690	0.2001	0.2210	0.2801
134	0.1416	0.1684	0.1993	0.2202	0.2791
135	0.1411	0.1678	0.1986	0.2194	0.2781
136	0.1406	0.1672	0.1979	0.2186	0.2771
137	0.1401	0.1666	0.1972	0.2178	0.2761
138	0.1396	0.1660	0.1965	0.2170	0.2752
139	0.1391	0.1654	0.1958	0.2163	0.2742
140	0.1386	0.1648	0.1951	0.2155	0.2733
141	0.1381	0.1642	0.1944	0.2148	0.2723
142	0.1376	0.1637	0.1937	0.2140	0.2714
143	0.1371	0.1631	0.1930	0.2133	0.2705
144	0.1367	0.1625	0.1924	0.2126	0.2696
145	0.1362	0.1620	0.1917	0.2118	0.2687
146	0.1357	0.1614	0.1911	0.2111	0.2678
147	0.1353	0.1609	0.1904	0.2104	0.2669
148	0.1348	0.1603	0.1898	0.2097	0.2660
149	0.1344	0.1598	0.1892	0.2090	0.2652
150	0.1339	0.1593	0.1886	0.2083	0.2643

Tabel r untuk df = 151 - 200

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
151	0.1335	0.1587	0.1879	0.2077	0.2635
152	0.1330	0.1582	0.1873	0.2070	0.2626
153	0.1326	0.1577	0.1867	0.2063	0.2618
154	0.1322	0.1572	0.1861	0.2057	0.2610
155	0.1318	0.1567	0.1855	0.2050	0.2602
156	0.1313	0.1562	0.1849	0.2044	0.2593
157	0.1309	0.1557	0.1844	0.2037	0.2585
158	0.1305	0.1552	0.1838	0.2031	0.2578
159	0.1301	0.1547	0.1832	0.2025	0.2570
160	0.1297	0.1543	0.1826	0.2019	0.2562
161	0.1293	0.1538	0.1821	0.2012	0.2554
162	0.1289	0.1533	0.1815	0.2006	0.2546
163	0.1285	0.1528	0.1810	0.2000	0.2539
164	0.1281	0.1524	0.1804	0.1994	0.2531
165	0.1277	0.1519	0.1799	0.1988	0.2524
166	0.1273	0.1515	0.1794	0.1982	0.2517
167	0.1270	0.1510	0.1788	0.1976	0.2509
168	0.1266	0.1506	0.1783	0.1971	0.2502
169	0.1262	0.1501	0.1778	0.1965	0.2495
170	0.1258	0.1497	0.1773	0.1959	0.2488
171	0.1255	0.1493	0.1768	0.1954	0.2481
172	0.1251	0.1488	0.1762	0.1948	0.2473
173	0.1247	0.1484	0.1757	0.1942	0.2467
174	0.1244	0.1480	0.1752	0.1937	0.2460
175	0.1240	0.1476	0.1747	0.1932	0.2453
176	0.1237	0.1471	0.1743	0.1926	0.2446
177	0.1233	0.1467	0.1738	0.1921	0.2439
178	0.1230	0.1463	0.1733	0.1915	0.2433
179	0.1226	0.1459	0.1728	0.1910	0.2426
180	0.1223	0.1455	0.1723	0.1905	0.2419
181	0.1220	0.1451	0.1719	0.1900	0.2413
182	0.1216	0.1447	0.1714	0.1895	0.2406
183	0.1213	0.1443	0.1709	0.1890	0.2400
184	0.1210	0.1439	0.1705	0.1884	0.2394
185	0.1207	0.1435	0.1700	0.1879	0.2387
186	0.1203	0.1432	0.1696	0.1874	0.2381
187	0.1200	0.1428	0.1691	0.1869	0.2375
188	0.1197	0.1424	0.1687	0.1865	0.2369
189	0.1194	0.1420	0.1682	0.1860	0.2363
190	0.1191	0.1417	0.1678	0.1855	0.2357
191	0.1188	0.1413	0.1674	0.1850	0.2351
192	0.1184	0.1409	0.1669	0.1845	0.2345
193	0.1181	0.1406	0.1665	0.1841	0.2339
194	0.1178	0.1402	0.1661	0.1836	0.2333
195	0.1175	0.1398	0.1657	0.1831	0.2327
196	0.1172	0.1395	0.1652	0.1827	0.2321
197	0.1169	0.1391	0.1648	0.1822	0.2315
198	0.1166	0.1388	0.1644	0.1818	0.2310
199	0.1164	0.1384	0.1640	0.1813	0.2304
200	0.1161	0.1381	0.1636	0.1809	0.2298

Titik Persentase Distribusi t
d.f. = 1 - 200

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr 0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Lampiran I : KUESIONER PENELITIAN

PENGANTAR KUESIONER

Perihal :Permohonan Pengisian Kuesioner

Lampiran :Satu Berkas

Judul Skripsi :Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi pada program Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, maka peneliti mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dalam rangka penulisan skripsi, maka peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner dan memilih jawaban pada kolom yang telah disediakan.

Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan sebagai keperluan untuk menyusun skripsi yang berjudul, “**Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**”. Maka untuk itu pengisian kuesioner ini mohon diisi seobjektif mungkin.

Sebagaimana penelitian ilmiah, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dalam memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang merugikan dan sebelum mengembalikan kuesioner ini, Bapak/Ibu dimohon dapat memeriksa kembali semua jawaban dalam tiap bagian, peneliti berharap tidak ada butir/pertanyaan yang terlewat atau tidak terjawab.

Atas kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini, diucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya,

Nurul Fahmi

KUESIONER

Sehubungan hal tersebut peneliti ingin mengetahui pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas laporan keuangan Pemerintah.

A. Identitas Responden

Pilih jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda silang (X) atau menuliskan jawaban pada kotak yang tersedia.

1. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
2. Pendidikan Terakhir :
3. Usia : tahun
4. Masa Kerja : tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda cek list (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat atau yang mewakili perasaan Bapak/Ibu.

Keterangan:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- KS = Kurang Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Pertanyaan/Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Penerapan basis akrual untuk pengakuan aset dalam Neraca Laporan Keuangan SKPD pada kantor bapak/ibu.					
2	Penerapan basis akrual untuk pengakuan kewajiban dalam Neraca Laporan Keuangan SKPD pada kantor bapak/ibu.					
3	Penerapan basis akrual untuk pengakuan ekuitas dalam Neraca Laporan Keuangan SKPD pada kantor bapak/ibu.					
4	Penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD pada kantor bapak/ibu.					
5	Penerapan basis kas untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD pada kantor bapak/ibu.					
6	Penerapan basis kas untuk pengakuan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD pada kantor bapak/ibu.					
7	Aset dicatat sesuai dengan nilai wajar dalam Laporan Keuangan SKPD pada kantor bapak/ibu.					
8	Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam Laporan Keuangan SKPD pada kantor bapak/ibu.					
9	Menyajikan dengan wajar transaksi yang seharusnya disajikan, maka transaksi tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya dalam Laporan Keuangan SKPD pada kantor bapak/ibu.					
10	Menyajikan dengan wajar peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya dalam Laporan Keuangan SKPD pada kantor bapak/ibu.					

11	Laporan keuangan SKPD kantor bapak/ibu dilaporka sesuai dengan periode pelaporan yang ditentukan.					
12	Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan SKPD pada kantor bapak/ibu.					
13	Laporan Keuangan SKPD kantor bapak/ibu menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna.					
14	Laporan Keuangan SKPD kantor bapak/ibu menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, laporan perubahan saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, laporan arus kas, laporan perubahan Ekuitas, dan catatan atas Laporan Keuangan.					

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

No	Pertanyaan/Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
15	Laporan Keuangan mengandung informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi kejadian mereka di masa lalu.					
16	Laporan keuangan mengandung informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.					
17	Laporan keuangan menyajikan informasi yang tepat waktu sehingga dapat					

	berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.					
18	Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.					
19	Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.					
20	Laporan keuangan menyajikan setiap fakta secara jujur.					
21	Laporan keuangan dapat diverifikasi.					
22	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.					
23	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

RIWAYAT HIDUP



Nurul Fahmi panggilan Nurul lahir di Gattareng pada tanggal 10 Desember 1995 dari pasangan suami istri Bapak Bakri dan Ibu Nurlina. Peneliti adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln Sultan Alauddin Lorong 2 D Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh yaitu SD Inpres 10/73 Arallae lulus tahun 2008, SMP Negeri 3 Salomekko lulus tahun 2011, Madrasah Aliyah Palattae lulus tahun 2014, dan mulai mengikuti Program S1 Akuntansi Kampus UNISMUH sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Kampus Alauddin.